

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA SE-INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANA MEI RAFIKA**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **THE AFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE TO INDONESIA LOCAL GOVERNMENT HUMAN DEVELOPMENT INDEX**

By:

**Ana Mei Rafika**

This research aims to analyze the affect of government expenditure to Indonesia local government human development index with PDRB as control variable. The research employes qualitative method by secunder data using 212 local governments as sample or 2011-2013. Analysis of data used in this research is to test the classical assumption and hypothesis testing with multiple linear regression method.

The result shos that realization of local government expenditure in education, health and economic funcation have positive affects singnificantly on human development index.

Keywords : Government expenditure, human delelompment index.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SE-INDONESIA**

Oleh:

**Ana Mei Rafika**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota di Indonesia PDRB dengan atas dasar harga konstan sebagai variabel kontrol. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 212 Kabupaten/Kota untuk tahun 2011-2013. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: Belanja daerah, indeks pembangunan manusia.

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA SE-INDONESIA**

Oleh

**ANA MEI RAFIKA**

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA EKONOMI**

Pada

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
SE-INDONESIA**

Nama Mahasiswa : *Ana Mei Rafika*

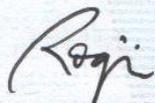
No. Pokok Mahasiswa : 1211031137

Jurusan : Akuntansi

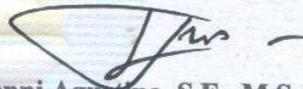
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

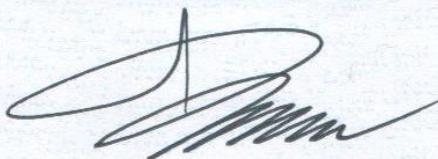


**Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  
NIP 19750620 200012 2 001



**Yenni Agustina, S.E., M.Sc, Akt.**  
NIP 19830830 200604 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

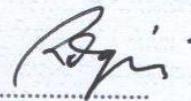


**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

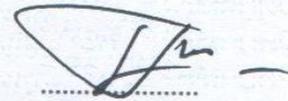
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

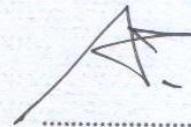
**Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.** .....



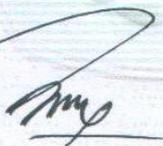
**Sekretaris : Yenni Agustina, S.E., M.Sc, Akt.** .....



**Penguji Utama : Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt.** .....



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Desember 2017**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

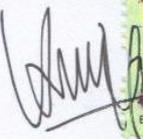
**Nama : Ana Mei Rafika**

**NPM : 1211031137**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se- Indonesia” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarism atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2017

Penulis,



Ana Mei Rafika  
NPM. 1211031137

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Merabung tiga pada tanggal 17 Mei 1995, beragama islam, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ali Sodikin dan Ibu Siti Asmariah.

Pendidikan yang telah diselesaikan penulis :

Lulus SD N 2 Tiuh Memon Kec. Pugung, Kab. Tanggamus lulus

Tahun 2006

Lulus SLTP N 1 Pugung Kec. Pugung, Kab. Tanggamus lulus

Tahun 2009

Lulus: SMA Xaverius Pringsewu Kab. Pringsewu lulus tahun 2012

Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa sebagai mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan D III Akuntansi.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Sarjana ilmu Akuntansi di Universitas Lampung.

## **MOTTO**

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu (QS. Al-Baqarah/2: 45)

Jadikan Kesalahan Sebagai Bahan Introfeksi Diri Untuk Menjadi Yang Lebih Baik

Allah Tidak Menjanjikan Hari-hari Tanpa Kesedihan, Tawa Tanpa Sedih, Panas Tanpa Hujan,  
Tetapi Allah Menjanjikan Kekuatan Untuk Menghadapi Hari-hari Sulit, Hiburan Untuk  
Tangisan, dan Petunjuk Untuk Menjalani Kehidupan.

## **PERSEMBAHAN**

Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta yang telah segala untuk penulis, mendukung serta selalu berdoa untuk keberhasilan penulis.

Untuk Kakak-kakak ku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa untuk menanti keberhasilan penulis.

Adikku tersayang yang selalau mendukung dan member semangat kepada penulis.

Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu menemani penulis dalam mencapai kelulusan.

Almamater tercinta

## SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesias ebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Ki Agus Andi, S.E., M.Si., Akt selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Niken Kusumaardani, S.E., M.Sc., Akt. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Mbak Tina, Mpok, Mas Veri, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Leman, Mas Ruli, Mbak Diah, atas bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tua, Bapak (Ali Sodikin) dan Ibu (Siti Asmariah) yang telah memberikan kasih sayang nasihat, arahan, dukungan, dan tiada hentinya selalu mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesanku.
10. *My Sister*, Ina Fitri Yanti yang telah memberikan dukungan, doa, nasihat, motivasi, selalu cerewet memberikan masukan dan selalu sabar mendampingi.
11. *My Brother*, Alfi Agus Salim yang telah memberikan , dukungan, doa, nasihat, , motivasi, selalu dan selalu sabar mendampingi.

12. Adik tersayang Fajar Habib Nabawi yang selalu memberikan keceriaan
13. Anisa, Mimi, Disti, Mbak Puri, Betzy, Agnes, Mia terima kasih atas dukungan, keceriaan, canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini. Tetap jalin silaturahmi ya.
14. Rekan-rekan seperjuangan Konversi 2015. Anisa, Mimi, Disti, Mbak Puri, Rifa, Nova, Wiwid, Meli, Ari, Novelin, Marisa, Mbak Bocil, Mbak Rinda, Yuninda, Nyoman, Kak Dedi.
15. Deni Agustiawan terima kasih atas kesabaran, dukungan, keceriaan, canda, tawa, selama proses penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan masukan, bantuan dan saran.
16. Keluarga KKN Desa Nambah Dadi, Anisa, Atika, Paulus, Evan, Apri, Aiman terima kasih atas pengalaman hidup selama 40 hari dan dukungan yang telah diberikan.
17. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 08 Desember 2017  
Penulis,

**Ana Mei Rafika**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup.....	5

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kajian Teori.....	6
2.1.1 Teori Keagenan.....	6
2.2 Belanja Daerah .....	7
2.3 Balanaja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan.....	11
2.4 Balanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan.....	11

2.5	Banja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi.....	12
2.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	13
2.7	Indek Pembangunan Manusia .....	13
2.8	Peneliti Terdahulu .....	15
2.9	Pengembangan Hipotesis .....	16
2.9.1	Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	18
2.9.2	Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia.....	19
2.9.3	Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Terhadap Pembangunan Manusia .....	21
2.10	Kerangka Penelitian.....	23

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Desain Penelitian.....	24
3.2	Populasi dan Sampel .....	24
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	25
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	25
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	25
3.5.1	Variabel Independen.....	25
3.5.1.1	Belanja Daerah Fungsi Pendidikan (BFPD) .....	26
3.5.1.2	Belanja Daerah Fungsi Kesehatan (BFKS).....	26
3.5.1.3	Belanja Daerah Fungsi Ekonomi (BFEK) .....	26
3.5.2	Variabel Dependen.....	26
3.6	Teknik Analisis Data.....	27
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif .....	28
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	28
3.6.2.1	Uji Normalitas .....	28
3.6.2.2	Uji Multikolinieritas .....	29
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas .....	29
3.7	Uji Hipotesis .....	30
3.7.1	Analisis Regresi Linier Berganda .....	30

3.7.2 Analisis Koefisiensi Determinasi .....	31
3.7.3. Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) .....	31
3.7.4 Uji Singnifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t) .....	32

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Data dan Sampel .....	33
4.1.2 Statistik Deskriptif .....	34
4.2 Uji Asumsi Klasik .....	38
4.2.1 Uji Normalitas .....	39
4.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas .....	42
4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	43
4.3 Uji Hipotesis.....	44
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	44
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi .....	45
4.3.3 Uji Statistik F .....	46
4.3.4 Uji t-statistik.....	46
4.4 Pembahasan.....	48
4.4.1 Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	48
4.4.2 Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	50
4.4.3 Pengaruh Realisasi Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	51
4.5 Pembahasan dan Hasil Analisis .....	53

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan.....	56
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	57
5.3 Implikasi dan Saran Penelitian .....	58

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
3.1 Tingkat dan Pengukuran IPM .....	27
4.1 Pemilihan Sampel .....	33
4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	34
4.3 Hasil Uji Normatif Model Pertama Sebelum Transformasi dan Outlier.....	39
4.4 Uji Normalitas Probability Plots.....	41
4.5 Hasil Uji Normalitas.....	41
4.6 Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
4.7 Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.8 Uji Koefisien Regresi.....	44
4.9 Pengujian Koefisien Determinasi.....	45
4.10 Uji Statistik F.....	46
4.11 Hasil Pengujian t-statistik.....	47
4.12 Hasil Uji Hipotesis.....	48

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian.....	22
4.1 Grafik Indeks Pembangunan Manusia.....	35
4.2 Grafik Pendidikan.....	36
4.3 Grafik Kesehatan .....	37
4.4 Grafik Ekonomi .....	38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Indeks Pembangunan Manusia

Lampiran 2 : Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Menurut Fungsi Pendidikan

Lampiran 3 : Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Menurut Fungsi Kesehatan

Lampiran 4 : Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Menurut Fungsi Ekonomi

Lampiran 5 : Presentase Kenaikan Dari Tahun 2011-2013

Lampiran 6 : Hasil Olah Data SPSS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Strategi pembangunan suatu negara Indonesia harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kedua Undang-Undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk mengembangkan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas belanja modal. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasil-hasilnya, baik antara pusat dan daerah khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan diantara di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (perkapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran.

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap Indek Pembangunan Manusia ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) serta Priambodo, Anugrah (2015). Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas. Peneliti menambahkan variabel belanja daerah dari penelitian Priambodo, Anugrah (2015) dikarenakan penelitian

sebelumnya belanja daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah belanja daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Indonesia terus mengalami peningkatan. Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (UNDP) baru-baru ini menyatakan Indonesia sebagai negara yang berkembang terus mengalami kemajuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 hingga 2014, berarti IPM Indonesia hingga 2014 mengalami kenaikan 44,3 persen. Mengukur IPM Indonesia tahun 2014, yakni angka harapan hidup sebesar 68,9 harapan tahun bersekolah 13,0, rata-rata waktu sekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas sebesar 7,6 dan pendapatan nasional bruto per capital 9,788.

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Sahrah, 2014).

Mencermati alokasi pengeluaran pemerintah terhadap akses publik terjadi kondisi yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut tampak dari masih relatif tingginya

alokasi anggaran belanja rutin dibanding anggaran belanja pembangunan, baik dalam skala nasional maupun regional. Khusus mengenai alokasi pengeluaran pendidikan, rencana alokasi 20% untuk anggaran pendidikan masih jauh dari realita (Suparto,2015).

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian data penulis dirasa perlu untuk dilakukan pengujian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Badrudin dan Khasanah (2011) yang menguji tentang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan peneliti : 1) Tidak mengujin pengaruh pendapatan daerah dan belanja infrastuktur terhadap indek pembangunan manusia 2) Tidak menguji pengaruh belanja menggunakan time lang. 3) Menggunakan data realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi, 4) Menggunakan sampel Kabupaten/kota Se- Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
- 2) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
- 3) Bagaimana Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia?

### **1.3 Tujuan Peneliti**

Berdasarkan pokok masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut fungsi kesehatan.
2. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut fungsi pendidikan.
3. Untuk mengetahui pendapatan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia menurut fungsi ekonomi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1) Manfaat Akademis

Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademis mengenai pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Indonesia.

#### 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pihak Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dalam memahami bagaimana pengaruh belanja daerah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

### **1.5 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengaruh belanja daerah menurut fungsi pendidikan kesehatan dan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Keterkaitan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pendelegasian wewenang tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Disamping itu, teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam

bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

## **2.2 Belanja Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah daerah memiliki wewenang mengeluarkan belanja daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan fungsi maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah. Struktur APBD sesuai Permendagri No. 13 tahun 2006 membagi klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, program dan kegiatan, serta kelompok belanja. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: (a)

pelayanan umum, (b) ketertiban dan keamanan, (c) ekonomi, (d) lingkungan hidup, (e) perumahan dan fasilitas umum, (f) kesehatan, (g) pariwisata dan budaya, (h) agama, (i) pendidikan, serta (j) perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program sedangkan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan program yang terdiri dari: (1) belanja pegawai, (2) bunga, (3) subsidi, (4) hibah, (5) bantuan sosial, (6) belanja bagi hasil, (7) bantuan keuangan, dan (8) belanja tidak terduga.

### **Jenis – jenis belanja Daerah**

Secara umum Belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu:

#### **a. Belanja Administrasi Umum**

Belanja Administrasi Umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Perjalanan Dinas, merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja Operasi, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Publik

Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja Pegawai, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
2. Belanja Barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja Perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja Pemeliharaan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.

### c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:

1. Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.
2. Belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contoh belanja aparatur: pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

### d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

1. Angsuran Pinjaman
2. Dana Bantuan
3. Dana Cadangan

#### e. Belanja Tak Tersangka

Belanja tak tersangka adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa.

### **2.3 Balanaja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan**

Berdasarkan pasal 49 bahwa alokasi anggaran adalah alokasi pada sektor pendidikan. Dalam istilah penganggaran, sektor sepadan dengan fungsi, hal ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi. Fungsi itu sendiri memiliki pengertian perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

### **2.4 Balanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan**

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi.

Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan kesehatan di Indonesia juga dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan pada tahun 2014 merupakan pembangunan kesehatan berkelanjutan dengan hasil yang sudah mulai menunjukkan kecenderungan membaik dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya.

### **2.5 Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi**

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## **2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

## **2.7 Indek Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir;

pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia sebagaimana yang dikeluarkan oleh UNDP yakni merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 2015 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

## 2.8 Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia disajikan pada table dibawah ini:

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Peneliti
1	Putra dan Ulupui (2015)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.	Dependen Y Pertumbuhan ekonomi  Independen X Belanja modal PAD DAU	Pada penelitian ini variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mampu meningkatkan IPM.
2	Tri Maryani (2015)	Analisis indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah	Dependen Y Pertumbuhan ekonomi  Independen X DAU PAD DAK Belanja Modal IPM	Belanja dibidang pendidikan pemerintah bidang kesehatan dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif terhadap pada IPM.
3	Desy Suryani (2015)	Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap kemiskinan dan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Tanggarang	Dependen Y Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal  Independen X Angka Kemiskinan IPM	Sebuah belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi memberikan pengaruh terhadap kemiskinan sedangkan pegawai berpengaruh negative atau pun positif dalam pemerintahan.
4	Syivai Aviyanti	Analisis pengaruh belanja pemerintah	Dependen Y Pendapatan	Belanja daerah dan kesehatan selama

	dan Susilo (2016)	terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur	Perkapita Independen X IPM	periode 2010-2012 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikansi terhadap IPM sedangkan belanja pemerintah bidang infrastruktur menunjukkan pengaruh positif.
--	-------------------	---	----------------------------	--

## 2.9. Pengembangan Hipotesis

Musgrave (2013) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar maka presentasi pemerintah terhadap PDB semakin kecil. Aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke belanja-belanja untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat.

Sabagai provinsi yang sedang akan berkembang pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi hingga kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi lebih berkembang. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyediakan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan *output* agregat jika modal manusia merupakan *input* dalam fungsi produksi agregat.

Investasi publik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi akan memberikan kesempatan yang lebih merata kepada masyarakat sehingga sumber daya manusia handal yang sehat dan mempunyai daya beli yang lebih baik dan menjadi semakin bertambah. Meningkatnya pendidikan dan kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi ini akan memajukan perekonomian masyarakat dengan bertambahnya kesempatan kerja serta berkurangnya kemiskinan.

APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai belanja daerah termasuk belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Belanja pemerintah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat supaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semakin besar jumlah belanja pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya juga bantuan dari pemerintah, diharapkan akan mendorong peningkatan alokasi dana untuk

masyarakat. Pengalokasian dan belanja pemerintah untuk kesejahteraan, diharapkan lebih besar untuk kemajuan daerah dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **2.9.1 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Maurize dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja daerah menurut bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pendidikan merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah (BPS, 2015). Pendidikan merupakan modal manusia untuk mendapat penghidupan yang layak dan memiliki SDM yang bisa mengikuti perkembangan dunia.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Serta dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid

yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014:41).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H1 : Belanja Daerah Menurut Fungsi Pendidikan Berpengaruh Positif Terhadap Indek Pembangunan Manusia.**

### **2.9.2 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Penelitian Maryani (2012) menunjukkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan. Mauriza dkk (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Aviyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan selama periode 2007-2012 juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. (Kuncoro, 2013).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia dan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang.

Todaro & Smith, 2012, bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Kesehatan, Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji maka berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM yang ada saat ini. (Rumate 2015).

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H2 : Belanja Daerah Menurut Fungsi Kesehatan Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.**

### **2.9.3 Pengaruh Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Musgrave (2012) mengemukakan bahwa kebijakan anggaran dapat mempengaruhi perekonomian melalui tiga aspek utama yaitu perpindahan sumber daya, distribusi pendapatan, dan pemisahan terhadap *output*. Dengan kata lain kebijakan anggaran pemerintah dapat memengaruhi alokasi *input* dalam suatu ekonomi.

Penurunan nilai tukar, kenaikan BBM (pencabutan subsidi, inflasi, BI rate naik, pertumbuhan kredit menurun mempengaruhi aliran modal internasional masuk ke dalam negeri. Berpengaruh positif terhadap pendapatan atau perekonomian negara dari pajak meningkat karena pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan (SIDIP) serta peningkatan perluasan basis pajak, belanja negara meningkat terutama belanja barang dan belanja modal serta kenaikan belanja lainnya. Apriyani (2015)

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, artinya semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor/satuan kerja/ kementerian negara/ lembaga (Huda, 2012: 84). Sementara itu, sumber-

sumber penerimaan harta publik (*baitulmal*) dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup zakat, '*usyr, khums, fai*', *jizyah* dan *kharaj*. Semua sumber pemasukan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran terpenting untuk menangani berbagai pengeluaran, disamping juga untuk mendistribusikan kekayaan di antara golongan masyarakat miskin dan kaya (Chaudry, 2012: 253-254). Pengeluaran pemerintah itu. semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Suparmoko, 2000: 22).

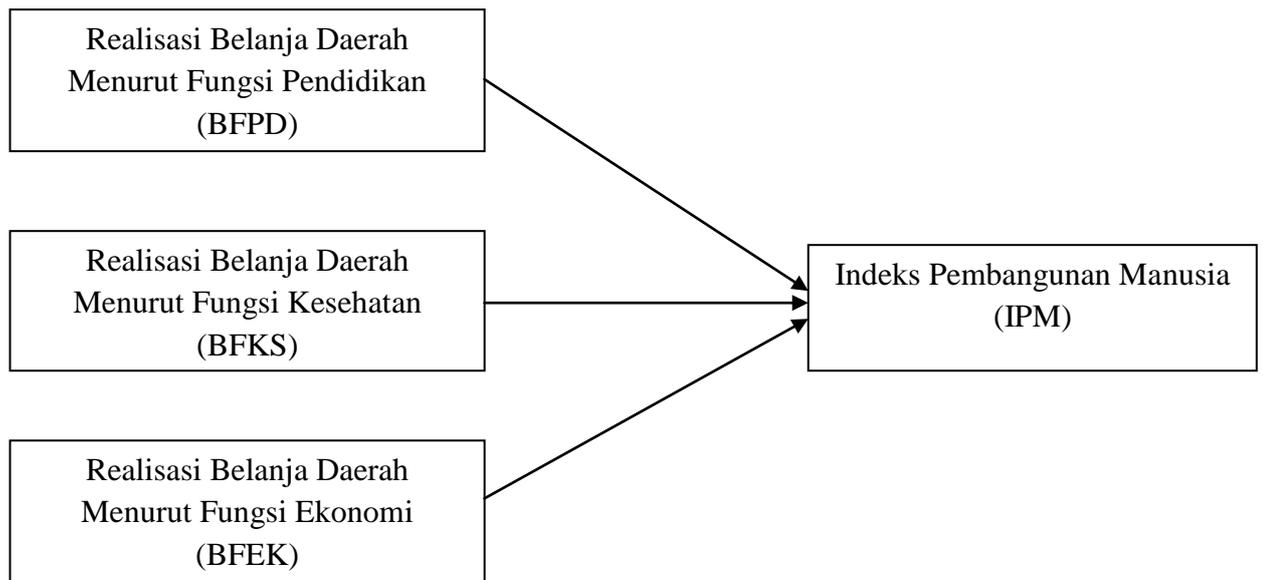
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3 : Belanja Daerah Menurut Fungsi Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.**

## 2.10 Kerangka Penelitian

Model yang dapat dikembangkan berdasarkan teori dan pengembangan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh realisasi belanja daerah yang diukur dengan belanja menurut fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja menurut fungsi ekonomi serta menambah variabel control PDRB atas dasar harga konstan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Adapun sampel penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Se-Indonesia dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota Se-Indonesia menyimpan data APBD dan dipublikasikan pada ebsite Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan secara berurut-urut pada tahun 2011-2013.
2. Memiliki data IPM dan data Selama tahun 2011-2013 dipublikasikan pada website [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

3. Menyesuaikan dengan tingkat tinggi rendahnya IPM yang ada di Indonesia.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi tahun 2011-2013 yang penulis didapat melalui website Dijen Perimbangan Keuangan yaitu <http://www/djpk.go.id>. Sedangkan data IPM dan PDRB atas harga konstan diperoleh dari website Badan Statistic yaitu <http://www.bps.go.id>.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder mencatat dan mengelolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Studi pustaka yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku artikel serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

### **3.5 Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.5.1 Variabel Independen**

Variabel independen adalah variabel yangt menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain. Penelitianini akan menggunakan variabel belanja daerah sebagai variabel indeviden. Variabel belanja daerah akan diproksikan dengan belanja pendidikan,

kesehatan dan ekonomi. Variabel belanja daerah dalam penelitian pendidikan, kesehatan dan ekonomi memiliki satuan angka paling besar yang akan menimbulkan heteroskedastisitas sehingga harus diubah di bentuk logaritma natural (*In*). Variabel belanja daerah masing-masing dapat diukur dengan:

#### **3.5.1.1 Belanja Daerah Fungsi Pendidikan (BFPD)**

Variabel belanja pendidikan dalam penelitian ini adalah belanja daerah pada APBD dalam urusan pendidikan, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2011) dan Sunarni (2017).

#### **3.5.1.2 Belanja Daerah Fungsi Kesehatan (BFKS)**

Variabel belanja kesehatan dalam penelitian ini adalah dihitung dari belanja daerah pada APBD dalam urusan kesehatan, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2011) dan Sunarni (2017).

#### **3.5.1.3 Belanja Daerah Fungsi Ekonomi (BFEK)**

Variabel Belanja Ekonomi dalam penelitian ini akan adalah dihitung dari belanja daerah pada APBD untuk urusan ekonomi, mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2011) dan Sunarni (2017).

#### **3.5.2 Variabel Devenden**

Dalam penelitian ini IPM digunakan sebagai variabel dependen. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Adapun tiga indikator adalah indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator ekonomi. Dalam mengatur IPM (BPS, 2015) merumuskan:

$$IPM = \frac{1}{3} (1_{Pendidika} \times 1_{Kesehatan} \times 1_{Ekonomi})$$

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan (BPS 2015), dengan tingkatan dan capaian IPM sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat dan Pengukuran IPM**

<b>Tingkat Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Pengukuran</b>
Kelompok sangat tinggi	$IPM \geq 80$
Kelompok tinggi	$70 \leq IPM \leq 80$
Kelompok sedang	$60 \leq IPM < 70$
Kelompok rendah	$IPM < 60$

Sumber : Sinta Amggrany (2016)

### 3.6 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui tentang pengaruh belanja daerah terhadap IPM Se-Indonesia tahun 2011-2013, maka metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi dan data panel dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap

variabel dependen maka kita lakukan uji statistic. Penelitian ini merupakan modifikasi dari peneliti sebelumnya oleh Susilo (2014).

### **3.6.1 Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif terdiri dari berbagai perhitungan nilai *mean*, *medium*, standar deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing data sampel. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu belanja daerah yang dalam hal ini adalah dapat merubah belanja daerah menurut fungsi kesehatan, pendidikan dan kesehatan terhadap Kabupaten/Kota Se- Indonesia. (Apriya Adtya 2016)

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

Agar tercapai suatu estimasi koefisien regresi berganda mencapai kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) atau menjadi model estimasi yang paling baik harus memenuhi asumsi klasik. Uji klasik yang digunakan diantaranya uji heteroskedastis, multikolinieritas, serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistributor normal. (Gujarati 2013)

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini pada penelitian ini akan digunakan uji Jarque

Bera dan membandingkannya dengan nilai chi square table. Hipotesis yang digunakan adalah  $H_0$  data terdistribusi normal dan  $H_1$  data tidak terdistribusi normal.  $H_0$  ditolak jika hasil JB lebih besar dari nilai Chi square table artinya data tidak terdistribusi normal. Namun bila nilai JB hitung lebih kecil dari nilai chi square table maka  $H_0$  diterima, artinya data terdistribusi normal. (Gujarati 2013)

### **3.6.2.2 Uji Multikolinieritas**

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya masalah multikolinieritas adalah dengan membuat matriks korelasi antara variabel independen jika nilai korelasi antara variabel berada pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika ada dibawah 0,8 maka tidak multikolinieritas. Untuk melakukan pengujian ini penulis menggunakan soare maka dianalisis hubungan variabel independen apakah terjadi multikolinieritas atau tidak. (Susilo 2014).

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam modal regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual antar satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap maka disebut heterokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang heterokedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas. Winarno (2015)

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas adalah uji Glesjer. Menurut Winarni (2015) Uji glesjer menggunakan nilai absolut residual sebagai variabel dependen. Jika nilai probabilitas hasil uji glesjer dibawah  $\alpha$  maka dapat disimpulkan menggunakan heterokedastisitas.

### 3.7 Uji Hipotesis

Setelah melakukan pengujian untuk melihat diantara ketiga model yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi klasik maka analisis dilanjutkan dengan hipotesis, antaranya:

#### 3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi linier. Peneliti ini akan menggunakan data per kapita untuk belanja daerah, hal ini dilakukan untuk menetralkan perbedaan jumlah penduduk antara daerah di kabupaten/kota Se Indonesia. Selain itu, karena pengaruh daerah pada tahun  $t$  tidak langsung berpengaruh pada tahun  $t$  maka digunakan persamaan regresi berganda pada penelitian ini :

$$IPM_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 BFPD_t + \beta_2 BFKS_t + \beta_3 BFEK_t + \varepsilon$$

Keterangan:

- IPM<sub>t+1</sub> = Indeks pembangunan manusia pada tahun t+1  
 BFPD<sub>t</sub> = Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan pada tahun t  
 BFKS<sub>t</sub> = Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan pada tahun t

$BFEK_t$	= Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi pada tahun t
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien variabel independen
$\varepsilon$	= Error trem

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $p \text{ value} > 0,05$  atau apabila nilai signifikansi lebih dari  $\alpha$  0,05 yang berarti modal regresi dalam penelitian ini tidak layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima apabila  $p \text{ value} > 0,05$  atau apabila nilai signifikansi kurang dari  $\alpha$  0,05 yang berarti modal regresi dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan dalam penelitian.

### 3.7.2 Analisis Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen yaitu realisasi belanja menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi terhadap IPM. Semakin besar  $R^2$  maka menunjukkan semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait.

### 3.7.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ .

#### **3.7.4 Uji Singnifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Uji bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka hipotesis suatu variabel independen secara individu memengaruhi variabel dependen dapat diterima artinya ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika  $t_{hitung}$  lebih rendah dari  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dan pembahasan baik secara statistik mampu secara komprehensif berdasarkan fakta empiris, kajian teori maupun peraturan terkait, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan berpengaruh positif (terdukung) terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, terbukti melalui peran serta pemerintah dalam mengoptimalkan realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan agar dapat membangun manusia menjadi maju dan memiliki SDM yang berdaya saing tinggi.
2. Realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan berpengaruh positif (terdukung) terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Peningkatan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis yang memadai meningkatkan kesehatan masyarakat dalam kontribusi serta meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi berpengaruh positif (terdukung) terhadap IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. Pengaruh positif ini berarti bahwa realisasi belanja fungsi ekonomi berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dan peningkatan masyarakat atas pendapatan dan akan mempengaruhi kemakmuran. Sehingga dapat meningkatkan IPM Kabupaten/Kota di Indonesia.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti tiga variabel yang ada dalam belanja daerah menurut fungsi, sedangkan sesuai Permedagri NO. 13 Tahun 2006 jumlah belanja daerah menurut fungsi seluruhnya ada 9 (Sembilan). Oleh karena itu diharapkan untuk penelitian selanjutnya bias menggunakan lebih dari 3 belanja menurut fungsi agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan aspek jangka pendek sehingga data yang diambil adalah data tahun yang sama dengan realisasi belanja daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta IPM.
3. Sampel akhir 212 Kabupaten/Kota di Indonesia, karena pada saat penelitian mengeloah data, data terbaru realisasi belanja menurut fungsi yang berasal dari ebsite Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan adalah realisasi belanja tahun anggaran 2012.
4. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pengaruh realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan dan realisasi belanja daerah menurut fungsi ekonomi secara global dan tidak menganalisis pengaruh masing-masing Kabupaten/Kota terhadap IPM, sehingga penelitin selanjutnya diharapkan bisa meneliti secara individual seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan budaya pada Kabupaten/Kota di Indonesia agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

### 5.3 Implikasi dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi dan asaran baik dalam praktik mampu bagi penelitian yang akan datang yaitu:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini, contohnya: PENDI, KESEH, EKON dan yang lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya harapkan untuk mengambil aspek jangka panjang sehingga dapat di ambil tahun setelah realisasi untuk memperkuat aspek yang dirasakan sebenarnya setelah realisasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan peningkatan realisasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar bias benar-benar terserap oleh masyarakat guna meningkatkan IPM daerah tersebut.

3. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah diharapakan mampu untuk melakukan efisiensi anggaran khususnya bagi anggaran yang fungsinya bukan untuk memenuhi hidup orang banyak dan bukan untuk memajukan pembangunan kontribusi lainnya yang tidak perlu. Kemudian mengoptimalkan anggaran yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta melakukan control atau pengendalian dalam penyaluran anggaran publik tersebut agar benar-benar samapi ke sasaran program dan sasaran pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrur R. Dyah W Sari, H. Setianto Rahmat dan R. Primanti Martha. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ardiansyah dan Widiyaningsih (2014) Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis*. Vol. 1 .No. 1 Tahun 2012.
- Astri, Meylina, 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis*. Vol. 1 .No. 1 Tahun 2012.
- Aviyanti, Syivia dan Susilo. 2016. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Barudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*. Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1996-2009*. Universitas Diponegoro Semarang.
- BPS 2015, Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 Metode Bary. <http://www.bps.go.id>. Diunduh pada tanggal 3 Desember 2015.
- Chris Rowley dan Keith Jackson. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Denhadrt, Janet V dan Denhard Robert B. 2007. *The New Public Service*. Londen: M.E. Sharpe, Inc.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *LGF Realisasi Belanja Fungsi Tahunan 2010*. [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id).
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta. Erlangga.
- Eva, Bernadet Maria, 2016. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fical Stress pada Kabupaten/Kota SE- Sumatra Tahun 2014.

- Ghozali, Imam . (2013) . Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : BP Universitas Diponegoro
- Kuncoro, 2013 Analisis Kesehatan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Huda, 2012: 84. Pendapatan Pemerintah Atas APDB daerah jawa timur.
- Mrdiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta :Penerbit Andi
- Maryani, Tri, 2012. Analisis Indeks Perkembangan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Maurize, dkk, (2013).Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Meier, dalam Winarti, (2014:41) Analisis Pembangunan Manusia Fungsi kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pcapaian Masyarakat Kota Jawa Tengah.
- Republik Indonesia. 2006. Buku Pegangan: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- Riduwan,dan Sunarto, 2007. Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung : Alfabeta
- Priambodo, Anugrah (2015). Indeks Pembangunan Manusia di Seluruh Indonesia. Jakarta.
- Rumate (2015).Analisis Kesehatan Yang Berdasarkan Angka Kemiskinan di Manado.
- Santoso, Singgih. 2002. Statistik dengan SPSS. Jakarta : Elex media Komputindo.
- Sahrah, 2014. Pengaruh Kesehatan Tentang Angka Kemataian Ibu dan Bayi.
- Suharyadi dan Purwanto. 2009. *Statistika Untuk ekonomi dan keuangan modern*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sunarni, 2017. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal fakultas ekonomi dan bisnis unila*
- Suparmoko, 2000: 22, Pemerintah Daerah Yang Berkaitan Tentang Kemakmura. Jakarta.
- Tjiptoherijanto, dan Astri (2013) Pengaruh Kesehatan Masyarakat Yang Ada di Provinsi Aceh.
- Todaro & Smith, 2012. Kesehatan Atas Gizi Peningkatan Fasilitas Pemerintahan Yogyakarta.
- \_\_\_\_. UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- \_\_\_\_. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Revisi Pertama atas UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999.
- \_\_\_\_. UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Revisi Pertama atas UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999.
- \_\_\_\_. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- \_\_\_\_. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.

Wahid, 2012. Perkembangan Realisasi Pemerintahan Atas Pendidikan Se- Sumatera. Universitas Yogyakarta

Wahyu, 2011. Indeks Pembangunan Manusia Atas Pendidikan Kesehatan Serta Pendapatan Daerah Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia. Jakarta.

Wahyudi. 2015. Pengaruh Alokasi Belanja Daerah Untuk Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2007-2009). Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Indonesia. Jakarta.